

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi demokrasi Indonesia saat ini sudah semakin membaik, indikatornya adalah dilaksanakannya pemilihan umum secara kontinyu dan aman. Tahun 2018 dan 2019 dikatakan sebagai tahun politik di mana pada tahun 2018 dilaksanakan pemilukada secara serentak dan pada tahun 2019 dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan. Pemilu biasa disebut sebagai arena pertarungan bagi para aktor politik, maka dari itu kalah dan menang merupakan hal biasa. Apalagi untuk caleg pendatang baru, untuk mendapatkan kemenangan mereka harus bekerja keras untuk meyakinkan rakyat agar mau memberikan suara kepadanya. Maka dari itu, seorang pendatang baru harus benar-benar bisa menjual program kerja kepada rakyat supaya bisa mendapatkan suara dari rakyat.

Walaupun biasanya yang terjadi dalam pemilu kemenangan masih di dominasi oleh seorang petahana, tetapi tidak sedikit juga petahana yang berhasil di tumbangkan oleh penantang. Seperti yang terjadi pada pemilihan DPR RI Di Dapil DIY tahun 2019, caleg yang lolos ke senayan kebanyakan seorang petahana, tetapi ada seorang pendatang baru yang baru pertama kali mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI dan berhasil menumbangkan petahana. Berikut merupakan tabel nama-nama caleg yang lolos pada pemilu DPR RI Dapil DIY tahun 2019 :

Tabel 1.1

Daftar Caleg Lolos Pemilu DPR RI Dapil DIY Tahun 2019

No	Nama Caleg	Asal Partai	Perolehan Suara
1.	My Esti Wijayanti	PDIP	176.306
2.	H. A. Hanafi Rais, S.IP., MPP	PAN	171.316
3.	Drs. H. Mohammad Idham Samawi	PDIP	158.425
4.	H. Sukanto, SH	PKB	85.941
5.	Dr. H. Sukamta	PKS	73.425
6.	Andhika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc	Gerindra	69.925
7.	H. Subardi, S.H., M.H	Nasdem	67.920
8.	Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M	Golkar	65.535

Sumber: Diolah oleh peneliti dari KPU RI (2019).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa caleg yang lolos ke senayan dari Dapil DIY masih didominasi oleh petahana. Namun, dari jumlah suara yang diperoleh dari pemilihan tersebut terdapat tiga seorang petahana yang gagal mempertahankan kemenangannya. Ketiga petahana tersebut yaitu Roy Suryo dari Partai Demokrat, Titiek Suharto dari Partai Berkarya, dan Agus Sulistyono dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Kekalahan petahana memang menjadi fenomena yang menarik yang terjadi pada pemilihan umum, namun hal itu menjadi lebih menarik apabila seorang petahana di tumbangkan oleh penantang yang sama-sama berasal dari partai politik yang sama dan terlebih lagi seorang petahana tersebut

sudah menjabat dua kali berturut-turut menjadi anggota DPR RI. Petahana H. Agus Sulistyono, ME,MT yang sudah menjabat dua kali berturut-turut tidak bisa menjabat kembali sebagai DPR RI untuk Periode 2019-2024 karena suara yang diperoleh lebih rendah dari pada suara yang didapatkan oleh H.Sukanto S,H seorang caleg DPR RI pendatang baru pada pileg yang sama-sama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Biasanya sebagai seorang pendatang baru pada pileg itu sulit untuk menggeser posisi seorang petahana, karena seorang pendatang baru pada pileg belum memiliki pengalaman pada pemilu legislatif dibandingkan dengan seorang petahana, dalam hal ini pileg DPR RI. Seharusnya seorang petahana lebih memiliki pengalaman tersebut dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh petahana yang diperoleh pada masa kepemimpinan sebelumnya dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjaring dan memobilisasi suara yang akan membantu kemenangannya dalam pemilihan berikutnya. Tetapi

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi menangnya pendatang baru H.Sukanto S,H pada Pemilu DPR RI Dapil DIY Tahun 2019. Adapun judul yang diambil oleh peneliti untuk penelitian ini adalah “MENANGNYA PENDATANG BARU PADA PILEG 2019: STUDI KASUS TERHADAP H. SUKAMTO, SH (CALEG PKB) DI DAPIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini merumuskan bahwa permasalahannya adalah pendatang baru yang baru pertama kali maju sebagai caleg DPR RI berhasil menumbangkan seorang petahana yang sudah menjabat dua kali berturut-turut. Selain itu, antara pendatang baru dan petahana tersebut berasal dari partai yang sama. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengajukan pertanyaan “Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan caleg pendatang baru PKB bernama H. Sukamto pada Pileg 2019 di Dapil DIY?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menyebabkan kemenangan caleg pendatang baru pada pemilihan legislative DPR RI dari Partai PKB bernama H. Sukamto pada Pileg 2019 di Dapil DIY.

D. Manfaat Penelitian

Menurut peneliti, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru bagi peneliti mengenai menangnya pendatang baru dalam pemilu legislatif.

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah pengetahuan bagi pembaga terkait dengan kegagalan *incumben* dalam perebutan kusi di DPR dalam kontestasi pemilu dan pentingnya mengetahui secara mendalam apa saja yang menjadi faktor-faktor yang membuat caleg pendatang baru meraih kemenangan.

c. Bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi sebagai bahan bacaan dalam kajian ilmu politik dan juga memberikan referensi mengenai studi-studi terkait kemenangan dalam kontestasi pemilu secara khusus.

d. Bagi Pelaku Politik

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau pembelajaran bagi caleg pendatang baru untuk terus meningkatkan strateginya dalam pemilu legislatif.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya, serta ilmu politik pada khususnya terkait dengan kajian yang berhubungan dengan pendatang baru dalam pemilu legislatif.

E. Literatur Review

Penelitian ini menggunakan 20 literatur review yang bersumber dari artikel jurnal yang berbeda-beda yang tentunya berkaitan dengan judul yang diambil peneliti. Tujuan dari analisis kajian pustaka atau literature review ini adalah memperoleh persamaan dari penelitian yang akan diteliti dan juga untuk menggali informasi guna mendapatkan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga didapat kebaharuan dalam penelitian ini. Literatur pada penelitian ini peneliti bagi menjadi empat klasifikasi. *Pertama*, Teori Kubus Kekuasaan/*Powercube Theory* yang terdiri dari 7 artikel jurnal yaitu dari Zakaria, Adela & Nurlela (2019), Chalik (2017), Fadli, Bailusy, Nas, & Zulfikar (2017), Chalik (2016), Batubara & Asrinaldi (2018), Nasir (2015), dan Kriyanto, Ramadlan, & Setiawan (2015). *Kedua*, Pemilu Legislatif Secara Umum terdiri dari 2 artikel jurnal dari Nurazizah, Usman & Prianto (2015) dan Ikrajendra (2014). *Ketiga*, Pemenangan caleg pada pemilu legislatif terdiri dari 5 artikel jurnal yaitu dari Aminulloh (2010), Pujono, Muktiyo & Hastjarjo (2015), Samsa (2020), Sagala, Astrika & Fitriyah (2016) dan Fadhillah & Rafni (2011). *Keempat*, faktor kemenangan pendatang baru sebanyak 6 artikel jurnal yang ditulis oleh Sanjaya (2017), Hasan, Hasrullah

& Sultan (2018), Putri & Qodir (2017), Hertanto & Mulyaningsih (2017), Ratri, Amaliatulwalidin, & Isabella (2019), serta Gunawan, Bainus & Paskarina (2020).

Menurut Zakaria, Adela & Nurlela (2019) ditinjau dari perspektif *powercube*, dalam pemilihan kepala desa di Simalungun Sumatera Utara, menghasilkan temuan bahwa dalam pemilihan kepala desa, kekuatan tersembunyi menjadi point penting. Hal tersebut karena tokoh masyarakat yang biasanya menjadi kekuatan tersembunyi memiliki kemampuan untuk memobilisasi massa dalam kampanye.

Menurut Chalik (2017), ditinjau dari perspektif teori *powercube*, dalam pemilu, terutama pilkada di Indonesia, terdapat 3 bentuk kekuasaan yang dapat mempengaruhi kemenangan petahana. Pertama, bentuk kekuasaan yang terlihat (*visible power*). Kedua, bentuk kekuasaan yang tersembunyi (*hidden power*). Ketiga, bentuk kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible power*).

Selanjutnya Fadli, Bailusy, Nas & Zulfikar (2018) lebih memperjelas dimana dalam pilkada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015, keterlibatan elit local cukup berpengaruh dalam peningkatan partisipasi politik. Elit politik lokal mensosialisasikan pasangan calon, menjadi tim kampanye dan tim relawan pasangan calon bupati/wakil bupati. Tokoh agama menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada dan mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada melalui kegiatan keagamaan. Sementara itu, tokoh adat berperan dengan memanfaatkan kharisma yang dimiliki mensosialisasikan informasi Pilkada kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan pasangan calon

kemudian mendukungnya dalam Pilkada.

Dari penelitian yang dilakukan Chalik (2016) dijelaskan bahwa dalam pemilu kepala daerah di Jawa Timur, kekuasaan petahana dalam mengambil dukungan dari elit local lebih besar dikarenakan biasanya beberapa petahana juga berasal dari kalangan kiai dan santri, sehingga mempermudah akses dalam menerobos jaringan politik hingga di level basis. Dalam konteks teori *powercube*, pada ruang dan eksistensi kekuasaan, elit local yang berbasis pesantren bersinergi dengan kekuatan politik, terutama dealam upaya mendukung petahana untuk kembali menang dalam kontestasi pemilu.

Sejalan dengan penelitian Chalik (2016) , Batubara, Faisal & Arsinaldi (2018) menyatakan bahwa sebagian besar tokoh agama sebagai kekuatan tidak terlihat dalam perspektif *powercube*, dalam hal ini Kyai sering mamanfaatkan pola hubungan klientelistik untuk mendukung salah satu calon untuk memenangkan pemilu di Mandailing Natal. Hubungan klientelistik ini termasuk dalam *invisible power* dalam teory *powercube*. Namun, seperti yang terjadi di Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, pola hubungan klientelistik dimanfaatkan hanya untuk meningkatkan partisipasi pemilu tanpa ada tujuan politik tertentu.

Nasir, (2015) juga menyebutkan bahwa faktor sosiologis agama dalam hal ini Islam, dan organisasi keagamaan seperti NU, Persis dan Muhammadiyah diyakini memberi pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Kota Tasikmalaya. Disamping itu, adanya peran Kyai sebagai pemimpin keagamaan yang juga berafiliasi

dengan partai politik, cenderung dapat menjaga kestabilan perolehan suara sebuah partai politik.

Menurut Kriyanto, Ramadhan & Setiawan (2015), media massa menjadi kekuatan tersembunyi dalam pertarungan politik pada Pilkada Jawa Timur tahun 2015. Dalam pemilu tingkat local di Jawa Timur tahun 2015, Penyebaran informasi melalui media telah dicampuri kepentingan lain. kepentingan elit politik dan elit local membumbui penyebaran informasi yang kurang baik sehingga menyebabkan turunnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam pelaksanaan pemilu.

Penelitian yang dilakukan Nurazizah, Usman & Prianto (2015), menjelaskan bahwa Legislatif adalah lembaga perwakilan rakyat yang fungsi utamanya membuat Undang-undang atau peraturan, yang anggotanya terdiri dari orang-orang pilihan dan terpilih. Di Indonesia badan legislatif ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk tingkat Kabupaten atau Kota DPRDaerah, untuk di tingkat Provinsi disebut DPRD Propinsi. Sedangkan untuk di Pusat disebut DPR. Jadi kalau di sebut DPR saja tanpa tambahan Propinsi atau Kabupaten itu berarti DPR Pusat. Anggota DPR/DPRD ini mewakili seluruh kepentingan atau golongan yang ada di Indonesia. Jadi, Pemilu Legislatif adalah pemilihan umum yang diselenggarakan secara serempak untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR

Ikrajendra (2014) dalam penelitiannya, makna pemilu legislatif bagi masyarakat biasa yaitu pemilu legislatif sering dimaknakan sebagai ajang, dimana para calon legislatif dari partai dan background apapun berebut

simpati dan membuka pintu rumahnya untuk menerima kedatangan warganya, menghamburkan uang demi menarik perhatian dan mencitrakan diri sebaik mungkin. Sedangkan bagi caleg pemilu legislatif adalah ajang, media dan sarana untuk memperebutkan simpati dan suara masyarakat-pemilih.

Penelitian Aminulloh (2010), menjelaskan bahwa pemenangan caleg PKS dalam menghadapi pemilu legislatif 2009 yaitu menggunakan strategi komunikasi dakwah. Strategi pemenangan pemilu PKS selanjutnya direncanakan dalam bentuk empat tahapan aksi; pertama, PKS mendengar; kedua, PKS mengajak; ketiga, PKS bicara; dan keempat, PKS menang. Selain itu peran media juga digunakan oleh PKS karena peran media pada pileg sangat penting.

Menurut Pujono, Muktiyo & Hastjarjo (2015) terdapat beberapa pemenangan untuk memenangkan caleg yang digunakan partai Golkar pada pileg 2014 di Sragen yaitu Popularitas, citra dan akseptabilitas yang telah dimiliki oleh setiap caleg, komunikasi politik yang berguna untuk mempertegas dan menguatkan positioning yang telah mereka miliki dan adanya kekuatan ekonomi atau finansia.

Sagala, Astrika & Fitriyah (2016) dalam penelitiannya terdapat empat strategi yang digunakan oleh calon anggota legislatif di Kota Semarang pada pileg 2014 yaitu dengan memanfaatkan media massa dan media cetak, melakukan komunikasi kepada masyarakat secara langsung, berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan yang ada di masyarakat dan yang terakhir mengandalkan tim sukses dalam kampanye karena caleg merasa terbantu

dengan peran tim sukses.

Sementara itu Fadhillah & Rafni (2019) menjelaskan bahwa dalam pemenangan Emma Yohanna pada pileg Sumatra Barat 2019 menggunakan lima strategi yaitu strategi ofensif, strategi defensif, push marketing, pass marketing dan pull marketing. Kemudian Ada 5 Faktor yang mendukung keberhasilan strategi pemenangan Emma Yohanna yaitu faktor branding, faktor promosi, faktor modal dan faktor penempatan. Selain adanya faktor pendukung, ada juga faktor penghambat yang dialami Emma Yohanna pada masa kampanye yaitu keterbatasan untuk menjangkau konstituen karena luasnya wilayah Sumatera Barat yang menjadi daerah pemilihan.

Berbeda dengan pemenangan sebelumnya, penelitian Samsa (2020) menjelaskan bahwa pemenangan caleg Ade Kartika pada pileg 2019 menggunakan strategi isu politik identitas berbasis gender (perempuan) dengan mengakomodir beberapa isu gender yang menjadi pilihan utamanya dan menawarkan program yang dapat meraih suara yaitu program Peka.

Menurut Sanjaya (2017), dalam pendekatan marketing politik yang digunakan pendatang baru pada pileg di Dapil Lamandau dibagi menjadi tiga yaitu *pull* marketing, *push* marketing dan *pass* marketing. Dalam melaksanakan pendekatan marketing tersebut target utamanya adalah perempuan karena program yang dibawa berkaitan dengan perempuan. Selain menggunakan marketing politik juga menggunakan influencer tokoh yang berpengaruh untuk menarik perhatian masyarakat.

Menurut Hasan, Hasrullah & Sultan (2018), strategi komunikasi yang dilakukan oleh Tenri Olle Yasin Limpo dan Adnan Purichta Ichsan dalam pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015 sebagai wajah baru dalam pilkada adalah diawali dengan mengamati permasalahan, ketokohan dan kelembagaan, perencanaan dan pembuatan program, mengambil tindakan komunikasi dan evaluasi program kerja. Namun, hasil pemilu menunjukkan bahwa Adnan Purichta Ichsan menang sebagai kepala daerah Kabupaten Gowa tahun 2015. Walaupun kategori strategi yang dilakukan mereka sama, namun dalam kategori evaluasi program kerja, Hasan Hasrullah terjadi miss komunikasi dalam tim dan terbatasnya dana. Sementara itu, jaringan komunikasi Adnan Purichta Ichsan dari tingkat kabupaten hingga desa sangat rapi.

Faktor Kemenangan Koalisi sekaligus pendatang baru Suharsono-Halim dalam pemenangan pemilu kepala daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 menurut Putri & Qodir (2017) dipengaruhi beberapa factor. Faktor-faktor tersebut yaitu, adanya koalisi partai politik yang telah dibangun oleh partai politik pendukung dan pengusung pasangan, partisipasi politik yang meningkat dibandingkan pada pemilu tahun 2010, dan Modalitas. Modalitas tersebut diantaranya modal politik, modal social modal budaya dan modal ekonomi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Qodir (2017), Hertanto & Mulyaningsih, (2017) menyebutkan bahwa kemenangan pendatang baru sekaligus Bupati perempuan pertama di Lampung Chununia Chalim pada Pilkada Lampung Timur tahun 2015 dipengaruhi oleh factor

latar belakang keluarga, beliau merupakan keturunan dari kyai besar salah satu pendiri Nahdlatul Ulama di Lampung Timur. Kekuatan figur ini memanfaatkan dukungan dari organisasi masyarakat (ormas) di bidang keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama (NU), kelompok ibu-ibu pengajian (Fatayat), dan Gerakan Pemuda Ansor.

Sedangkan Ratri, Amaliatuwalidain & Isabella (2019) menyatakan bahwa kemenangan Yan Anton Ferdian sebagai wajah baru di Pilkada Kabupaten Banyuasin tahun 2013 bersumber dari kekuatan dinasti politik yang dimilikinya. Kemenangan tersebut didapat kekuatan modal sosial sang ayah. Modal yang dimiliki oleh Yan Anton Ferdian berupa modal sosial sekaligus simbolik, modal politik dan modal ekonomi. Modal ini kemudian dikembangkan menjadi berbagai strategi. Selanjutnya penerapan strategi tersebut akan mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Banyuasin berdasarkan pendekatan psikologis, sosiologis dan rasional, sehingga dengan itu dapat memenangkan pemilihan tersebut.

Menurut Gunawan, Bainus & Paskarina (2020) pada konteks pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, strategi yang digunakan pasangan calon Jamin Idhan dan Chalidin (JADIN) sebagai pendaftar baru untuk melawan petahana adalah strategi ofensif. Hal ini dikarenakan Pasangan Jadin mutlak harus melakukan strategi penawaran baru kepada khalayak pemilih di Nagan Raya dalam rangka membuat pemilih berpaling dari sebelumnya mendukung dinasti politik yang dibangun Ampon Bang beralih mendukung mereka. Dengan demikian strategi ofensif seperti perluasan pasar

dan menembus pasar dilakukan dalam rangka meraup pemilih yang sebelumnya kerap mendukung dinasti politik petahana. Berikut ini peneliti sajikan taksonomi literature rivew dalam penelitian ini.

Tabel 1.2

Daftar Literatur Review

No	Jenis	Penulis	Temuan
1.	Teori Kubus Kekuasaan/ <i>Powercube Theory</i>	Zakaria, Adela & Nurlela (2019) Chalik (2017) Fadli, Bailusy, Nas, dan Zulfikar (2017) Chalik (2016) Batubara & Asrinaldi (2018) Nasir (2015) Kriyanto, Ramadlan, & Setiawan (2015)	Dalam Teori Kubus Kekuasaan, dimensi bentuk kekuasaan seringkali dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan suara yang lebih terutama bentuk kekuasaan tersembunyi, dan tidak terlihat dengan memanfaatkan pihak-pihak atau kegiatan yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat, terutama elit agama dan elit local.
2.	Pemilu Legislatif Sacara Umum	Nurazizah, Usman & Prianto (2015) dan Ikrajendra (2014)	Pemilu legislatif diselenggarakan secara serentak meliputi pemilihan DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi yang nantinya akan menjadi wakil-wakil rakyat. Pileg dimata masyarakat biasa caleg berebut simpati masyarakat dan menghamburkan uang untuk menarik perhatian masyakatat sedangkan bagi caleg pemilu legislatif untuk merebut simpati dan suara dari masyarakat.
3.	Pemenangan Caleg Pada Pemilu Legislatif	Aminulloh (2010), Pujono, Muktiyo & Hastjarjo (2015), Samsa (2020), Sagala, Astrika & Fitriyah (2016) dan Fadhillah & Rafni (2019)	Pemenangan caleg pada pileg mayoritas menggunakan strategi komunikasi baik komunikasi dakwah maupun komunikasi langsung kepada masyarakat. Selain itu, menggunakan strategi isu politik identitas berbasis gender (perempuan) untuk caleg perempuan.

4.	Faktor Kemenangan Pendatang Baru	Sanjaya (2017) Hasan, Hasrullah, & Sultan (2018) Putri & Qodir (2017) Hertanto & Mulyaningsih (2017) Ratri, Amaliatulwalidin, & Isabella (2017) Gunawan, Bainus & Paskarina (2020)	Faktor kemenangan pendatang baru didukung oleh marketing politik yang baik dengan cara memetakan segmentasi, targetting dan positioning, kemudian strategi komunikasi yang kompak sampai ke tingkat bawah, hingga modalitas yang cukup, termasuk modal social, budaya, dan ekonomi
----	----------------------------------	---	--

Sumber : Diolah oleh peneliti (2020).

Berdasarkan kajian diatas, telah dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan teori kubus kekuasaan/*powercube theory*, Pemilu legislatif secara umum, Pemenangan caleg pada pemilu legislatif, dan yang terakhir yaitu faktor kemenangan pendatang baru dalam pemilu. Maka untuk pembeda dalam penelitian kali ini yaitu dimana penelitian sebelumnya belum ada yang membahas menangnya caleg pendatang baru Partai PKB pada pemilu 2019 di Dapil DIY dengan menggunakan pendekatan teori kubus kekuasaan. Focus penelitian ini adalah “MENANGNYA PENDATANG BARU PADA PILEG 2019: STUDI KASUS TERHADAP H. SUKAMTO, SH (CALEG PKB) DI DAPIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

F. Kerangka Dasar Teori

Berdasarkan topik yang hendak diangkat dalam penelitian ini, maka teori yang akan digunakan adalah tiga teori diantaranya yaitu : *powercube theory*, konsep tentang partai politik, dan juga sistem pemilu.

1. Teori Kubus Kekuasaan/*Powercube Theory*

Teori kubus kekuasaan atau *powercube theory* adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh John Gaventa. Teori ini mengambil akar dari teori yang terlebih dahulu telah dicetuskan oleh gurunya, Steven Lukes. Dalam bukunya yang berjudul “Power A Radical View”, Lukes menjelaskan teori 3 dimensi kekuasaan. Dimensi pertama menjelaskan tentang kekuasaan yang hanya focus pada satu hal saja, yaitu tindakan aktor dalam pengambilan keputusan. Dimensi kedua masih focus terhadap kepentingan subjektif dalam bentuk pilihan atau bahkan keluhan. Dimensi ketiga focus ke aspek memperhatikan pembuatan kebijakan dalam agenda politik sekaligus melihat control terhadap agenda tersebut (Halim, 2014).

Berangkat dari teori yang dicetuskan oleh Lukes, menginspirasi Gaventa untuk menciptakan teori baru yang disebut sebagai teori kubus kekuasaan atau *powercube theory* ini. Teori dari Gaventa ini menjelaskan kekuasaan yang terdiri dari tiga sisi atau dimensi yaitu, dimensi level, dimensi ruang, dan dimensi bentuk. Secara umum, teori ini dipahami sebagai control seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok yang lainnya. Konsep dari teori ini sendiri muncul dari persoalan kekuasaan yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi belum ada sebuah kajian yang lebih

mendalam bahkan konprehensif yang membahas tentang kekuasaan itu sendiri (Halim, 2014).

Secara umum, menurut Gaventa (2006) kekuasaan mempunyai tiga dimensi, yaitu sebagai berikut :

- a. Dimensi Tingkatan (*Dimensi Level*), yang terdiri atas: local, nasional dan juga global.
- b. Dimensi Ruang (*Dimensi Space*), yang terdiri atas: ruang tertutup (*closed*), ruang yang diperkenankan (*invited*), dan ruang yang diciptakan atau diklaim (*claimed/created*).
- c. Dimensi Bentuk (*Dimensi Forms*), yang terdiri atas: bentuk kekuasaan yang terlihat (*visible*), bentuk kekuasaan yang tersembunyi (*hidden*), dan bentuk kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible*)

Dimensi yang pertama yaitu dimensi tingkatan atau dimensi *level*. pada dimensi ini menjelaskan tingkatan atau level kekuasaan yang hendak dikaji yang dikelompokkan menjadi 3 tingkatan yaitu, local, nasional, dan global. Dalam analisisnya, ketiga tingkatan level ini tidak dapat terpisahkan, maka dari itu, sebuah kekuasaan dalam skala local harus meliputi analisis di tingkat nasional bahkan tingkat global Gaventa (dalam Hendriks, 2010). Sebagai contoh, ketika kita membicarakan aspek ekonomi politik pemerintah local, persoalan pembebasan lahan secara paksa oleh pemerintah untuk kepentingan ekonomi yang mana investor-investor yang terkait adalah agen-agen global, maka tidak tepat jika hanya membaca realitas politik local saja, akan tetapi juga perlu analisis tingkat nasional hingga global.

Menurut Gaventa (2006) terdapat tiga jenis Ruang, yaitu sebagai berikut:

- a. Ruang tertutup (*closed*) adalah ruang dimana ada sekompok aktor atau elite yang difungsikan untuk mengambil keputusan tanpa adanya pihak lain dan tanpa adanya keinginan untuk membuka lebih luas ruang untuk kemungkinan masuknya pihak lain.
- b. Ruang tersediakan (*invited*) adalah ruang yang dimana sengaja dibuat oleh para penentu kebijakan baik pada level local, nasional, maupun gobal baik yang disahkan secara hukum atau tidak dan bertujuan untuk mengundang lebih banyak pihak duduk bersama memutuskan sesuatu, ruang ini diatur untuk kegiatan para kelompok dan untuk konsultasi. Ruang yang diundang dapt diatur artinya masih dilembagakan dalam bentuk konsultasi satu kali.
- c. Ruang terciptakan (*claim*) adalah ruang yang di buat secara mandiri oleh masyarakat umum yang dilatarbelakangi oleh kekecewaan atas ruang-ruang yang telah tersdia diwilayah mereka untuk terlibat atau dibangun secara khusus untuk menyediakan ruang bagi aktivitas mereka sendiri tanpa ada intervensi dari pihak luar. Akan tetapi ruang yang di kalim oleh aktor ini kurang kuat, untuk menciptakan sesuatu yang lebih banyak.

Sedangkan dimensi bentuk menurut Gaventa (2006) terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuasaan terlihat (*visible power*) merupakan kekuasaan yang dapat Terlihat diruang public. Kekuasaan terlihat ini bisa dilihat ketika memasuki masa-masa pemilihan atau kampanye, para actor politik dan para elit partai berlomba-lomba dalam masa kampanye turun ke pemilih dengan menggunakan berbagai strategi kampanye dengan cara mereka sendiri-sendiri, mereka memobilisasi pemilih dan mengajaknya untuk terlibat dalam proses pemilu, hal tersebut merupakan bukti bagaimana kekuasaan yang terlihat direalisasikan dalam momentum pemilu dan pileg. Selain itu, dukungan partai politik pengusung dengan caleg yang diusungnya juga merupakan kekuasaan terlihat karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban partai pengusung untuk mendukung caleg nya yang maju pada pemilu legislatif.
- b. Kekuasaan tersembunyi (*Hidden power*) adalah dimana institusi tertentu yang berkuasa untuk mempertahankan pengaruhnya dengan mengontrol siapa yang dapat mengambil keputusan dalam sebuah agenda. Berdasarkan definisi tersebut dalam kekuasaan tersembunyi (*Hidden power*) terdapat campur tangan institusi yang memiliki kekuasaan dan berkaitan dengan pemilu dan pileg contohnya seperti dukungan dari penyelenggara pemilu. Selain itu, politik uang juga termasuk kekuasaan tersembunyi (*Hidden power*) karena politik uang

merupakan sebuah transaksi nyata yang berusaha disembunyikan, maka dari itu politik uang juga termasuk dalam kekuasaan tersembunyi (*Hidden power*).

- c. Kekuasaan yang tak terlihat (*invisible power*) adalah kekuasaan yang paling terdalam dan tidak terlihat, dimana kekuasaan yang tidak terlihat ini, mampu membentuk batasan-batasan proses keterlibatan secara ideologis dan psikologis. Dari definisi tersebut maka dalam pemilu legislative upaya melakukan mobilisasi dengan tokoh agama merupakan salah satu hal yang termasuk dalam kekuasaan tidak terlihat (*invisible power*).

2. Partai Politik

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk membebe dan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan juga negara, serta memelihara ketahanan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang mana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2007).

Partai politik merupakan sekelompok orang yang terikat kuat oleh keyakinan yang sama, kepentingan yang sama, dan komitmen yang sama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka, mungkin partai

menawarkan sebuah kebijakan alternatif untuk pemerintahan atau menduduki jabatan publik tertentu dengan catatan cara meraih kekuasaan tersebut adalah melalui jalur yang sah, legal, dan konsitusional (Al-Hamdi, 2020). Sigmund Neumann juga memberikan definisi terkait partai politik yaitu partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk merebut dukungan rakyat melalui jalan persaingan dengan suatu golongan ataupun golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda dengan tujuan untuk menguasai kekuasaan (Budiarjo, 2007).

Menurut Al-Hamdi (2020) Partai politik memiliki konsep dan klasifikasinya antara lain sebagai berikut:

a. Konsep tentang Partai Politik.

Menurut Neumann (dalam Al-Hamdi, 2020) “secara konseptual partai politik merupakan lembaga artikulatif yang mewakili kepentingan politik masyarakat dengan tujuan untuk mengawasi kekuasaan pemerintah serta berkompetisi untuk meraih suara dan dukungan pemilu”.

b. Klasifikasi Partai Politik.

Menurut Al-Hamdi (2020), Partai politik dapat di klasifikasikan berdasarkan dua hal yaitu berdasarkan ideology dan berdasarkan status kekuatan organisasi partai. Menurut sejumlah ilmuwan spektrum ideology partai politik kedalam sejumlah klasifikasi yang dapat dilihat dalam table 1.3 (Al-Hamdi, 2020).

Tabel 1.3

Klasifikasi spektrum ideology partai politik di Indonesia

ILMUWAN	BENTANGAN SPEKTRUM IDEOLOGI				
Liddle (2003)	Nasionalis-Soekarno	Universalis	Islam		
Baswedan (2004)	Nasionalis-Sekuler	Islam Fremdly	Islam Inklusif	Islam	
Ufen (2006)	Sekuler	Islam Moderat	Islam moderat	Campuran modernis dan tradisional	Islam modernis
Mietzner (2013)	Sekuler	Ideologi Moderat	Ideologi Moderat	Islam	

Sumber : Ambang Batas Pemilu (Al-Hamdi, 2020).

Dari tabel di atas, telah dijelaskan bahwa partai politik dibagi secara ideologis kedalam tiga spectrum yaitu nasionalis-sekuler, nasionalis-Muslim, dan nasionalis-Islamis. Menurut Al-Hamdi, (2020), "Pemilihan tiga klasifikasi tersebut didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, ketiga kekuatan tersebut merepresentasikan tiga varian masyarakat Indonesia akhirakhir ini, yaitu abangan, santri, dan jemaah tarbiyah. Kedua, ketiga kekuatan tersebut merepresentasikan kekuatan utama aspirasi masyarakat baik di tingkat nasional maupun lokal. Ketiga, partai-partai yang berada di dalam ketiga kekuatan politik tersebut telah berpartisipasi sebagai peserta pemilu dan selalu memiliki kursi representasinya secara terus-menerus di parlemen baik di tingkat nasional maupun local".

Al-Hamdi (2020), juga mengklasifikasikan partai politik di Indonesia berdasarkan kekuatan organisasi yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu, *pertama*, partai besar (*major parties*) yaitu partai-partai yang memperoleh suara di atas 10% pada Pemilu 2019. Partai-partai di kategori ini adalah nasionalis-sekuler. Partai yang termasuk dalam kategori ini seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar. *Kedua*, partai menengah (*medium parties*) yaitu Partai-partai yang memperoleh suara antara 4% dan 10% pada Pemilu 2019. Mayoritas partai Islam ada di kategori ini. Partai yang termasuk dalam kategori ini seperti PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP. *Ketiga*, partai kecil (*small parties*) yaitu Partai- partai lama yang

tidak mampu meraih ambang batas 4% suara secara nasional pada Pemilu 2019 maupun Partai-partai yang baru ikut berkontestasi pada Pemilu 2019 dan belum pernah menjadi kontestan pada pemilu sebelumnya. Perindo, Berkarya, PSI, dan Partai Garuda merupakan contoh partai yang masuk dalam kategori ini.

Hafied Cangara (dalam Labolo & Ilham, 2015) menarik suatu pemahaman bahwa partai politik mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu :

- a. Partai sebagai koalisi, yaitu membentuk koalisi dari berbagai kepentingan guna membangun kekuatan mayoritas.
- b. Partai sebagai organisasi, untuk mampu menjadi institusi yang dimanis, eksis dan berkelanjutan, partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan juga dibesarkan sehingga mampu menjadi menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus sebagai representasi dari sejumlah orang ataupun kelompok.
- c. Partai sebagai pembuat kebijakan (*policy making*). Untuk mampu menduduki jabatan- jabatan public, para calon yang diajukan oleh partai politik didukung secara konkret oleh partai politik tersebut. Dari posisi tersebut, partai politik mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi ataupun mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan mampu memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian dimana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolegitas partai.

3. Caleg, Pendaatang Baru dan Pemilu

Menurut Uber, Regar & Waleleng (2016), Caleg atau calon legislatif adalah orang yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif, calon legislative bisa di pusat dan di daerah yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan calon legislatif adalah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap.

Kandidat atau calon legislative ada yang merupakan seorang petahana ada juga yang merupakan seorang pendaatang baru. Kandidat pendaatang baru adalah seseorang yang baru pertama kali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislative pada saat pemilu legislative. Ada dua jenis caleg pendaatang baru yaitu pertama, adalah calon legislative yang benar-benar baru di dunia politik dan baru pertama kali mencalonkan diri menjadi anggota legislative baik di pusat maupun di daerah. Kedua, yaitu calon anggota legislative yang mana sudah lama didunia politik dan sebelumnya juga sudah pernah menjabat sebagai anggota legislative di daerah namun pada pemilu legislative diperiode selanjutnya mancalonkan diri kembali tetapi sebagai calon anggota legislative pusat. Jadi, caleg pendaatang baru bisa saja seseorang yang benar-benar baru di pemilu legislatif dan bisa saja

seseorang yang sudah berpengalaman di pemilu legislative namun ingin mengubah jabatannya menjadi lebih tinggi daripada jabatan sebelumnya.

Katz & Crotty (Allahi & Rahman 2020) menjelaskan bahwa ada tiga tingkatan dalam proses rekrutmen calon kandidat, yakni sertifikasi, pencalonan, dan pemilihan. Pertama, proses sertifikasi (*certification*), yaitu mengenai siapa yang layak untuk dipilih menjadi calon anggota legislatif. Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi para kandidat diadakan berdasarkan undang-undang pemilu. Persyaratannya adalah seperti umur, kewarganegaraan, rekam jejak, tempat kediaman, moralitas, inkompatibilitas, popularitas, simpanan keuangan, pengalaman berpolitik, dan keharusan untuk mengumpulkan tandatangan dukungan.

Kedua, proses pencalonan (*nomination*), ialah mengenai siapa yang memutuskan kandidat yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif. Untuk mengukur tingkat demokrasi dalam internal partai dapat dilihat dari beberapa hal, seperti: (a). Tingkat pemusatan, yaitu seberapa jauh pencalonan ditetapkan oleh kepemimpinan partai nasional atau diserahkan ke bawah kepada daerah setempat. (b). Keluasan dari mengambil bagian, yaitu mengenai apakah hanya beberapa orang yang memilih calon atau apakah banyak orang terlibat dalam proses ini. dan (c). Ruang lingkup pembuatan putusan, yaitu mengenai apakah ada pilihan dari satu, beberapa, atau bermacam-macam pendapat berlomba-lomba untuk pencalonan tersebut.

Ketiga, proses pemilihan (*election*), yaitu mengenai siapa yang terpilih sebagai hasil dari proses pencalonan. Tipe calon yang dipilih oleh partai mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi kualitas dari anggota legislator, dan juga susunan dari pemerintahan. Sebagai contoh, untuk memiliki pengaruh untuk lembaga legislatif, pembuatan kebijakan, dan penyelidikan tentang hasil pemilu, jika partai memutuskan untuk memilih pengacara profesional, atau aktivis lokal, selebriti, atau pegawai partai berpengalaman.

Proses pemilihan caleg yang akan duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan melalui proses Pemilihan Umum Legislatif atau Pemilu Legislatif. Dalam Pemilu Legislatif ini, rakyat memilih wakil yang dipercayainya dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Andrew Reynold dalam Labolo & Ilham (2015), menyatakan bahwa pemilu merupakan tata cara dimana suara yang didapatkan oleh para kandidat dan partai pada kontestasi pemilihan diubah menjadi perolehan kursi-kursi yang dimenangkan dalam dewan perwakilan atau parlemen.

Pemilu memiliki tujuan untuk memilih kepala pemerintahan atau kepala eksekutif dan untuk mensukseskan kebijakan umum yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terpilih. Selain untuk memilih kepala eksekutif, anggota legislatif atau parlemen juga dipilih melalui pemilu, dimana parlemenlah yang akan menetapkan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan serta mengawasi kegiatan pemerintah demi kepentingan rakyat (Mahmud, 2018).

Sistem pemilu merupakan suatu proses menghitung perolehan suara dalam suatu pemilu yang kemudian diubah menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh peserta pemilu. Rumusan pemilu yang digunakan, stuktur pemungutan suara, dan besaran dapil atau daerah pemilihan merupakan variable-variabel kunci dalam sistem pemilu. Dalam menghitung perolehan suara dalam suatu pemilu yang kemudian diubah menjadi kursi-kursi di badan legislatif, pemilihan sistem pemilu merupakan hal yang sangat menentukan siapa yang terpilih dan juga partai mana yang akan meraih kekuasaan (Reynolds, Reily & Ellis, 2005)

Pelaksanaan pemilihan umum dikenal sebagai kegiatan vital di suatu negara yang dinilai cukup sensitif. Maka dari itu di butuhkan pula sistem yang mampu menyelaraskan pemilihan umum agar tetap demokrasi, akuntabel, serta berkapabilitas mengingat sistem pemilu kerap di salah artikan oleh beberapa pihak. Selain itu, melalui sistem ini, penyelenggaraan pemilu dapat terkoordinir dengan baik mulai dari keabsahan partai politik,

ideologi dan tujuan partai politik, data kandidat anggota partai politik, dan juga mekanisme pemilihan umum (Kansil, 1986).

Sebagai kompetisi politik, terdapat sejumlah aktor yang dilibatkan dalam pelaksanaan pemilu. Masing-masing aktor mempunyai fungsi dan juga posisi tersendiri yang secara bersama memiliki kewajiban menyukseskan pelaksanaan pemilu. Menurut Sardini (2019), aktor-aktor tersebut dikelompokkan menjadi :

1. Aktor Utama Pemilu

a. Pemilih

Dalam konteks Indonesia, diantara aktor-aktor pemilu yang ada, posisi pemilih kerap kali terpinggirkan. Daftar pemilu selalu menjadi kontroversi dalam pelaksanaan pemilu. Padahal, hak-hak politik warganegara telah dijamin dalam konstitusi, termasuk dalam hal itu adalah hak memilih dalam pemilu.

b. Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya merupakan penyelenggara pemilu di Indonesia.

c. Peserta Pemilu

Baik dalam pemilu eksekutif maupun legislative, partai politik selalu menjadi pelaku dominan dalam pelaksanaan pemilu.

2. Aktor Pendukung

a. Pemerintah

Keberhasilan pemilu sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya pengiriman logistic pemilu ke tempat pemungutan suara, tidak akan berjalan tepat sasaran jika tidak ada dukungan yang baik dari pemerintah.

b. Lembaga Keamanan

Lembaga keamanan sangatlah penting dalam keberlangsungan pemilu. hal ini karena sangatlah mungkin terjadi pergesekan kepentingan diantara warga masyarakat.

c. Lembaga Penegak Hukum

Lembaga ini bertugas untuk mengontrol jalannya aturan yang sudah disepakati oleh semua pihak, termasuk jika terdapat kecurangan-kecurangan dalam pemilu.

d. Pemantau Pemilu

Pemantau pemilu adalah LSM, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri dan perwakilan negara sahabat yang telah mendaftar ke KPU dan telah memperoleh akreditasi untuk melaksanakan kegiatan pemantauan pemilu.

Dari semua aktor pemilu tersebut, haruslah saling bekerjasama untuk menciptakan pemilu yang sesuai dengan UUD 1945, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Apabila salah satunya tidak berfungsi dengan fungsinya, maka penyelenggaraan pemilu akan mengalami masalah dan tidak akan berjalan secara maksimal.

G. Definisi Konvensional

Definisi konseptual menurut Imam (2008) dalam Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi (2020), merupakan penarikan batas yang menjelaskan suatu konsep secara singkat padat dan jelas. Definisi konseptual berisi tentang penjelasan dari suatu variable yang dirumuskan oleh peneliti yang mengacu pada sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan tiga konsep yaitu :

- a. *Powercube Theory* atau teori kubus kekuasaan adalah teori yang dapat dipakai untuk memetakan hal-hal yang berperan didalam kekuasaan, para aktor didalamnya, persoalan dan situasi yang melatarbelakanginya. Teori ini sekaligus mampu menganalisis mengapa seseorang berpotensi memenangkan maupun kalah dalam pertarungan politik. Teori ini terdiri dari 3 dimensi yaitu, dimensi level, dimensi ruang, dan dimensi bentuk.
- b. Pemilu merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan di negara yang menganut system demokrasi. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Presiden,

- Wapres dan anggota legislative secara langsung, dengan begitu maka pemilu dijadikan sebagai ajang pertarungan antar partai politik.
- c. Partai Politik merupakan suatu organisasi yang didalamnya terdapat suatu kelompok dengan anggota-anggota yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama yaitu untuk merebutkan dukungan dari masyarakat agar bisa menduduki kekuasaan di pemerintahan, selain itu tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk membela dan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara ketahanan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - d. Pendaftar baru pada pemilu legislatif merupakan kandidat yang baru pertama kali mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Terdapat dua jenis pendaftar baru yaitu pertama pendaftar baru yang benar-benar baru di dunia politik dan baru pertama kali mencalonkan diri pada pemilu legislative, pendaftar baru seperti itu biasanya belum memiliki basis pendukung yang kuat. Pendaftar baru yang kedua yaitu dimana calon legislative sudah pernah menjadi anggota legislative sebelumnya tetapi di posisi atau jabatan yang berbeda.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Sugiyono (dalam Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi, 2020) adalah penetapan ciri yang akan

dipelajari sehingga akan menjadi variable yang bisa diukur. Pada penelitian ini definisi operasional yang digunakan peneliti adalah :

Tabel 1.4

Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Dimensi Bentuk <i>Powercube Theory</i> (Gaventa, 2006)	<i>Visible Power/</i> Kekuatan Terlihat	-Strategi kampanye kandidat untuk meraih simpati masyarakat melalui jualan program dan <i>branding profile</i> kandidat ke masyarakat atau ke pemilih -Dukungan dari partai politik
		<i>Hidden Power/</i> Kekuatan Tersembunyi	- Dukungan dari penyelenggara pemilu seperti KPU & Bawaslu (serta jajarannya sampai tingkat bawah) -politik uang
		<i>Invisible Power/</i> Kekuatan Tidak Terlihat	-Mobilisasi tokoh agama/priyayi/pondok pesantren maupun tokoh masyarakat

Sumber : Diolah oleh peneliti (2020).

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi (2020), penelitian kualitatif merupakan sebuah upaya untuk melakukan rasionalisasi dan juga interpretasi atau penafsiran terhadap realitas kehidupan yang didasarkan pada apa yang dipahami oleh peneliti. Penelitian empiris biasanya melibatkan sejumlah data lapangan/ bukti empiris yang menggambarkan kejadian-kejadian alamiah dan problematis serta makna dari kehidupan masing-masing individu.

Dalam penelitian kualitatif terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan yaitu, naratif, fenomenologis, etnografis, grounded theory dan studi kasus. Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut karena pendekatan studi kasus sangat relevan dengan topic yang peneliti ambil. Secara definitif, studi kasus adalah jenis pendekatan untuk menyelidiki serta memahami satu, dua atau lebih dari kasus sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dibatasi oleh ruang/tempat dan waktu serta pengumpulan sumber datanya melibatkan banyak pihak supaya didapatkan pemahaman yang

mendalam dan juga komperhensif (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi, 2020). Studi kasus dalam penelitian ini ialah Menangnya pendatang baru pada Pileg 2019 : Studi kasus terhadap H.Sukamto S,H (Caleg PKB) di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan atau pihak-pihak yang terkait dengan topic yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini data didapatkan dari caleg pendatang baru yang berhasil merebut kursi legislative pada pemilu 2019 di Dapil DIY yaitu Bapak H.Sukamto S,H yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tim sukses dari Bapak H.Sukamto S,H., Partai Kebangkitan Bangsa, KPU dan Bawaslu DIY serta Tokoh Agama yang bersangkutan

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan (*liberary research*) dengan menggunakan data yang tersedia yang berupa bahan-bahan pustaka seperti bukuilmiah, jurnal, undang-undang, artikel dan lain sebagainya yang

dianggap relevan dengan topic penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi yang terjalin antara pewawancara atau biasa disebut *interviewer* dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai/*interviewee* yang dilakukan melalui komunikasi langsung tatap muka ataupun secara daring atau online Yusuf (dalam Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi, 2020). Adapun dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan narasumber :

1. Caleg Pendaftar Baru PKB yang menang dalam pemilu 2019 di Dapil DIY
2. Tim sukses Caleg Pendaftar Baru PKB yang menang dalam pemilu 2019 di Dapil DIY
3. KPU dan Bawaslu DIY
4. Tokoh Agama yang bersangkutan

b. Teknik Studi Dokumentasi

Dalam Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi (2020), dijelaskan bahwa teknik studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Hal ini disebabkan

karena data berupa dokumen juga menyimpan informasi penting dan fakta yang dapat dimanfaatkan sebagai tambahan data dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi harus dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga pengelolaan data untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumen juga dapat berupa buku-buku, jurnal, atau gambar.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan jenis analisis data *statistic descriptive*. Menurut Sugiono (dalam Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi, 2020), *statistic descriptive* adalah *statistic* yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi, 2020), yang mana langkah-langkah dalam analisis data dibagi menjadi 4 langkah yaitu :

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian, kemudian melakukan pengelolaan data. Pengelolaan data dapat berupa penyalinan hasil rekaman suara wawancara menjadi teks,

kemudian data-data yang sudah terkumpul dipilah-pilah atau dikelompokkan berdasarkan indikator atau alat ukur yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Seleksi Data

Pada tahapan ini, peneliti akan memilih dan memilah data yang berguna serta data yang relevan untuk dipakai dalam proses analisis, apakah data tersebut berupa data deskripsi maupun data table dan gambar, dan menyisihkan data-data yang dianggap kurang relevan dengan topic yang diambil dalam penelitian ini.

c. Analisis antar-variabel dan verifikasi data

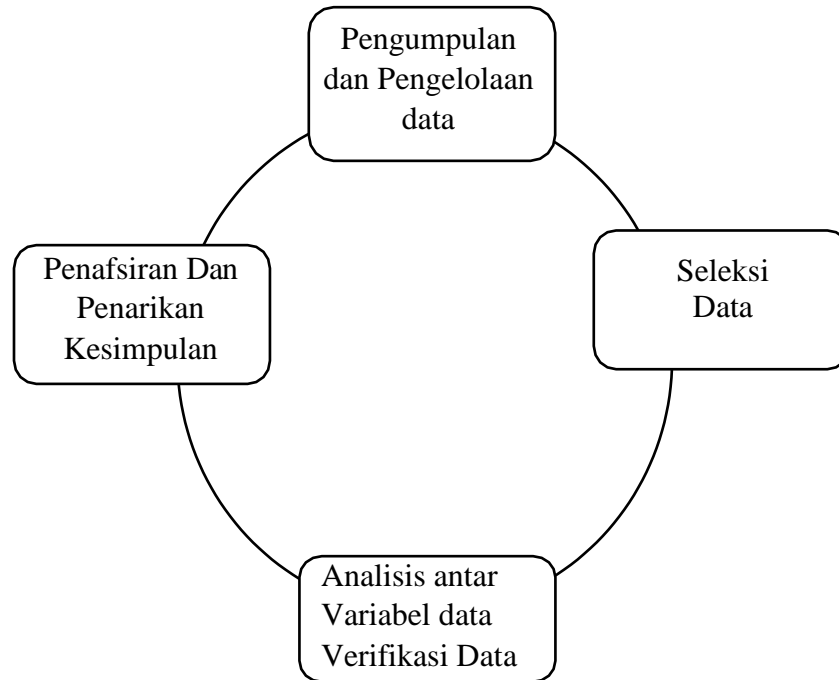
Dalam tahapan ini, peneliti akan mengaitkan temuan satu variable atau indikator dengan variable atau indikator yang lainnya. Kemudian apabila ditemukan data yang bersimpangan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya, maka peneliti akan melakukan verifikasi dengan cara mengonfirmasi ke pihak narasumber.

d. Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan ini, peneliti akan menafsirkan hasil data yang merupakan usaha untuk menjawab rumusan masalah yang sudah diajukan di awal yang didasarkan pada analisis antar-variabel dan verifikasi data yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil penafsiran inilah yang kemudian dijadikan dasar pijakan untuk menarik kesimpulan penelitian.

Langkah-langkah dalam analisis data menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi (2020) dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1. Langkah-langkah dalam Analisis Data



Sumber : Penelitian Kualitatif (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, Efendi, 2020).

J. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat kemudahan dalam pembahasan, maka dari itu penulis membuat sistematika penulisan yang terencana yaitu sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan

Sistematika Penulisan.

BAB II, Gambaran Objek Penelitian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai profil caleg dan profil Dapil DIY.

BAB III, Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian terkait faktor-faktor yang menyebabkan pendatang baru caleg DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta dari Patai PKB menang dalam Pileg 2019.

BAB IV, Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

